

**PERAN LEMBAGA NU (NADLATUL ULAMA)
DALAM MENDUKUNG PEROLEHAN SUARA PKB
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA TERNATE TAHUN 2009**

Oleh : ALI

ABSTRAK

Kehadiran Partai PKB sebagai anak emasnya NU telah menunjukkan eksistensi yang cukup memadai meskipun Peran organisasi NU yang baru masuk di Kota Ternate pada tahun 2008 di bawah pimpinan Drs. Hi.Ibrahim Muhamad dalam memfasilitasi kemenangan PKB sudah dianggap maksimal namun hal ini perlu di kaji lebih jauh mengapa PKB sebagai partai anak emasnya NU khususnya di Kota Ternate tidak mampu memenangkan Pemilu tahun 2009. Hal inilah yang menjadi Tujuan Penelitian penulis untuk memperoleh gambaran peran Lembaga NU dalam mendukung perolehan suara PKB pada pemilihan legislatif di Kota Ternate. Untuk mendapatkan gambaran tersebut penulis melakukan penelitian yang mana Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Kemudian setelah dilakukan penelitian penulis menemukan titik terang peran lembaga NU yang terdapat dalam tiga unsur pokok yaitu pertama Menggunakan Tema Islam Sebagai Alat Perjuangan, kedua Menjalin Hubungan Kerjasama Antara NU dengan PKB, dan yang ketiga Lembaga NU Sebagai Kekuatan Utama PKB Meskipun secara politis, PKB mendapatkan suara secara legitimasi kelahirannya dibidani oleh struktural NU, tetapi tetap terjadi terbelahnya suara NU di kota ternate menjadi dua yaitu ke PKB dan ke partai lama yaitu PPP. Dari hasil penelitian inilah penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Sejak awal pembentukan PKB, sebetulnya telah menimbulkan bibit konflik terutama dengan makin terseratnya struktural NU dalam kelahiran Partai baru PKB, Hal ini menjadi masalah serius karena akan berdampak pada polarisasi suara pada tingkat grass root, terbelah mengelompok pada massa PKB dan PPP. Dan Jika struktural NU tidak berhati-hati dalam bersikap, yaitu menaungi semua warga Nadliyin yang bernaung pada partai lain selain PKB, dapat diramalkan akan terjadi eskalasi konflik yang mengakibatkan pecahnya konflik secara fisik pada basis massa antar kedua partai PKB dan PPP, yang semua berasal dari rumah internal Nadliyin. Meskipun demikian dapat dipahami keterlibatan NU tersebut berakibat pada perolehan suara yang secara signifikan mampu menempatkan PKB di atas perolehan suara PPP dalam pemilu 2009 secara Nasional, dan khususnya di Kota ternate mendapatkan sebuah kursi di lembaga legislatif.

Key words : Peran Lembaga NU, PKB Pemilu Legislatif

PENDAHULUAN

Gerakan dari kaum nahdliyin yang telah dicapai sejak berdirinya tahun 1926 oleh Hasyim Asyari sebagai tokoh pendiri itu sekarang tampak luar biasa, dan gerakan kaum nahdliyin tersebut dewasa ini mungkin nampak sekali tengah berada memainkan peranan yang strategis dalam memainkan peranannya dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Mulai dari gerakan pondok pesantren yang didirikan oleh kaum santri dan para kiai, dengan infrastruktur yang sangat sederhana mampu

berkembang menjadi gerakan sosial terutama dalam pendidikan dan dakwah bergeser menjadi kekuatan politik yang di perhitungkan oleh semua parpol besar yang ada di negeri ini. Bahkan begitu pesatnya perkembangannya sampai-sampai para kiai mendadak menjadi para elit politik yang fatwa dan suaranya mampu membuat para tokoh selebritis politik melakukan "sowan politik" yang berarti jika restu didapat dari para sesepuh kiai tersebut berarti alamat kantong suara jamaah nahdliyin bisa di kantong dengan sukses. Dengan bergesernya peran tersebut maka kekuasaan akhirnya menjadi salah satu tujuan politik NU.

Kehadiran Partai PKB sebagai anak emasnya NU telah menunjukkan eksistensi yang cukup memadai, dimana dalam pemilu sebelumnya PKB belum sempat memperoleh sebuah kursi. Namun pada pemilu tahun 2009 PKB di Kota Ternate meraih satu buah kursi, suatu hasil yang cukup memadai dibandingkan dengan partai-partai lain yang berlatarbelakang ajaran agama.

Dari data di atas, tampak bahwa PKB sebagai partai baru yang lahir dari Peran NU secara tidak langsung, merupakan kendaraan politik yang diinginkan dalam mencapai kekuasaan legeslatif di Kota Ternate tidak lepas dari peran Jamaah Nahdliyin baik dari para elite NU maupun dari pendukung massanya. Meskipun Peran organisasi NU yang baru masuk di Kota ternate pada tahun 2008 di bawah pimpinan Drs. Hi.Ibrahim Muhamad dalam memfasilitasi kemenangan PKB sudah dianggap maksimal namun hal ini perlu di kaji lebih jauh mengapa PKB sebagai partai anak emasnya NU khususnya di Kota Ternate tidak mampu memenangi Pemilu tahun 2009.

Bertolak dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana peran Lembaga NU dalam mendukung perolehan suara PKB pada pemilihan legislatif di Kota Ternate Tahun 2009?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran peran Lembaga NU dalam mendukung perolehan suara PKB pada pemilihan legislatif di Kota Ternate.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis bagi penelitian selanjutnya mengenai budaya politik lokal yang ada di Ternate.
2. Secara praktis, diharapkan akan menjadi masukan bagi kaum nahdliyin dalam membuat strategi gerakan dan konsep politik supaya lebih efektif dalam mencapai tujuan politik yang diinginkan. Dan merupakan konsep politik yang dapat diterapkan oleh gerakan-gerakan yang sebangun dengan kaum nahdliyin yang mengandalkan jumlah atau massa . Sehingga dapat bermanfaat bagi jamaah tersebut pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu-pemilu yang lain pada masa yang akan datang.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Pada dasarnya desain deskriptif kualitatif disebut pula dengan kuasi kualitatif (Bungin, 2009). Maksudnya, desain ini belumlah benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu.

PEMBAHASAN

A. Konsep Peran

(Hendropuspito, 1989) menyebutkan konsep peran sebagai berikut:

“Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran akan menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Dengan demikian peran adalah fungsi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga berkenaan dengan kedudukannya di dalam masyarakat atau organisasi.”

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

B. konsep Lembaga

Kata “kelembagaan” berasal dari kata lembaga yang merupakan padanan dari kata Inggris “institution”, atau lebih tepatnya “social institution”; sedangkan “organisasi” padanan dari “organization” atau “social organization”. Sebagaimana kata Horton dan Hunt (1984: 211): “What is an institution? The sociological concept is different from the common usage”. Kedua kata tersebut pada mulanya digunakan secara bolak balik, baur dan luas, namun akhirnya lebih menjadi tegas dan sempit. Tujuannya adalah membangun suatu makna yang baku secara keilmuan, sebagaimana dipaparkan dalam bagian akhir bab ini.

C. Hubungan Antara NU Dan PKB

1. Tinjauan Secara Historis, Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebuah partai politik di Indonesia, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, (Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, A. Muchith Muzadi). Sejarah NU sebagaimana dituturkan oleh Choirul Anam dalam *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* serta Greg Barton dan Greg Fealy dalam *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan nahdlatul Ulama Negara*, bermula dari kekhawatiran para pemuka Agama Islam melihat perkembangan dinamika jaman pada masa itu.(ChoirulAnam, 1999). NU didirikan oleh para ulama terkemuka pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh para kiai terkemuka dan pemimpin pesantren, diantaranya adalah KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Chasbullah.
2. Tinjauan Secara Ideologis, Sejarah mencatat bahwa Roh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah warga Nahdliyyin atau dikenal dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU), hal ini mengingat bahwa deklarator PKB tidak lain adalah para Kiai dari kalangan NU itu sendiri. Secara hubungan timbal balik antara NU dan PKB, sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan begitu saja satu dengan yang lainnya, bahwa PKB dilahirkan atas inisiatif demi tersalurkannya aspirasi warga Nahdliyyin yang selama era Orba mengalami tekanan sehingga tidak mampu berekspresi secara maksimal. NU sebagai gerakan Islam tradisional sementara PKB dilahirkan dengan platform bukan sebagai partai Islam melainkan partai inklusif kebangsaan, Namun secara ideologis NU hampir sama dalam platform ideologis PKB. Dikarenakan PKB lahir demi tersalurkannya aspirasi warga nahdliyyin,
3. Tinjauan Secara Politis, demikian hubungan timbal balik antara NU dan PKB. Selain menjadi inisiatif demi tersalurkannya aspirasi warga nahdliyyin, PKB dianggap NU menurut Gus Dur” kembali ke rumah sendiri”. Dalam ranah politik, NU pertama kali terlibat dalam wilayah sosial politik, ketika NU mulai bergabung kedalam Al Majlisul Islami ‘ Ala Indonesia (MIAI) bersama Sarekat Islam , Muhammadiyah, Al irsyad dan beberapa organisasi ke-Islaman lainnya. NU juga mendukung berdirinya Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPPI) pada 1939. Secara formal

keterlibatan dalam dunia politik dimulai saat NU menjadi salah satu unsur organisasi dalam partai politik Islam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

4. Tinjauan Secara Organisatoris, Jika di tinjau secara formal yuridis, struktural dan organisasi hal tersebut benar bahwa NU dan PKB tidak memiliki hubungan, tetapi bukan hubungan dalam histories, kultural, sosiologis dan politis, hal tersebut dapat dilihat dalam keputusan Mukernas I PKB di Jakarta dalam pengakomodasian caleg dari kader NU. Dalam membangun hubungan yang lebih strategis dengan penguasa, maka para elit NU mengembalikan peran organisasi itu sebagaimana semangat awal pendirian. Sikap ini kemudian dikenal dengan slogan *kembali ke khittah 26*. Setelah melalui proses refleksi panjang, keputusan kembali ke khittah 1926 di tetapkan dalam Muktar NU ke -27 di Situbondo Jawa Timur pada tahun 1984. Keputusan Politik lainnya adalah penerimaan azas tunggal Pancasila. (Kacung Marijan, 1992:40).
5. Tinjauan Secara Sosiologis, Suasana minta restu kiai atau ulama yang dilakukan para kandidat di berbagai pesantren, menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati. Kantong-kantong suara umat Islam, baik yang berbasis massa NU maupun ormas Islam lainnya menjadi lahan incaran untuk diperebutkan. Secara sosiologis, hal tersebut dapat dipahami dari teori solidaritas sosial milik Emile Durkheim.
6. Tinjauan Secara Kultural, NU mesti mengkonsentrasikan gerakannya pada penggarapan masalah sosial keagamaan, yang beberapa waktu lalu sempat terhenti akibat gonjang-ganjing politik nasional yang telah memecah konsentrasi sebagian besar para petinggi kedua organisasi ini. Sekarang tiba saatnya bagi NU untuk bisa bekerja dalam jalur-jalur pergerakan kultural.
7. Untuk sampai ke arah itu, diperlukanlah keberanian moral dalam hubungannya dengan politik praktis. Dalam konstelasi yang paling kontemporer, misalnya, masing-masing perlu menarik garis demarkasi yang tegas antara NU dengan PKB. Ini penting dikemukakan, karena walaupun secara formal-institusional antara NU dengan PKB tidak mempunyai hubungan, namun secara kultural warga nahdliyin merupakan kantong suara yang secara politis kultural merupakan faktor penentu besarnya PKB. secara kultural warga nahdliyin merupakan kantong suara yang secara politis kultural merupakan faktor penentu besarnya PKB.

D. Pemilu Legislatif

Pemilu merupakan proses kegiatan yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Menggunakan Tema Islam Sebagai Alat Perjuangan

Menghadapi Pemilu pada tahun 2009 lalu, agama (Islam) memiliki beberapa peran penting dalam perjuangan PKB. Pertama Islam telah memberikan landasan identifikasi diri bagi PKB. Kedua, Islam telah pula berfungsi sebagai tema sentral perjuangan PKB. Ketiga, dalam masa Pemilihan Umum,

ia bukan saja berfungsi sebagai “pengikat” massa secara emosi keagamaan, tetapi juga telah menjadi alat untuk memberikan legitimasi keagamaan bagi kemenangan PKB.

Hasil wawancara dengan bapak AM sebagai wakil ketua Tanfidziyah bahwa dalam upaya untuk memenangkan PKB, NU di Kota Ternate melakukan beberapa strategi, antara lain dengan mengerahkan ulama-ulama NU untuk melakukan dakwah. Dengan melalui kegiatan pengajian, para ulama NU melakukan dakwah ke berbagai daerah yang di dalamnya juga mambicarakan tentang masalah politik yaitu dengan mengajak jamaah NU untuk berbondong-bondong memilih PKB sebagai satu-satunya partai orang NU. Ini menunjukkan bahwa fungsi ulama sebagai pemimpin agama telah dicampuri dengan kepentingan politik. Pengajian ini dilakukan secara rutin sehingga masyarakat bisa mengenal lebih dekat bagaimana perjuangan NU dalam upaya memenangkan PKB. Pemanfaatan dari segi agama juga terlihat dalam kampanye dengan tujuan untuk memikat massa di berbagai wilayah kecamatan. Bahkan ada pelaksanaan kampanye PKB yang dilakukan di berbagai wilayah kecamatan selalu dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Qur’an, setelah pembacaan ayat suci Al- Qur’an lalu dilanjutkan dengan nyanyian kasidah seperti yang terjadi di beberapa daerah di Kota Ternate. Bentuk lain penciptaan suasana itu terlihat ketika ada beberapa jurkam yang mengucapkan yel-yel “Allahu Akbar”.

B. Menjalin Hubungan Kerjasama Antara NU dengan PKB

Keterikatan yang erat antara PKB dengan Lembaga NU melahirkan kerjasama yang baik antara kedua lembaga ini, kerjasama ini tidak hanya terlihat dalam bidang politik tetapi terlihat juga dalam bidang agama yang kaitannya untuk menegakkan ajaran *Ahlussunah wal Jama’ah* dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan ini didasarkan pada kesamaan tujuan bersama yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis yang diridloi oleh Allah SWT spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itulah berarti secara formal PKB tidak berhadapan dengan negara disebabkan oleh tidak dipakai Islam sebagai asas atau ideologi (Syamsudin Haris, 1991 : 12).

Dalam upaya pengembangan PKB dan NU ini menekankan pada konsolidasi organisasi yang meliputi antara lain:

1. Rekrutmen anggota dan pembinaan keanggotaan

Memasyarakatkan pentingnya pendaftaran anggota kepada masyarakat umum khususnya kepada jamaah NU, memelihara daftar anggota, serta memantapkan keanggotaan partai yang bersifat perorangan. Memantapkan kebersamaan, kesetiaan, dan persaudaraan di antara anggota, pimpinan dan kader partai.

2. Usaha pengadaan sarana, prasarana, dan penertiban administrasi

Mengusahakan agar pimpinan partai di semua tingkatan mengusahakan kelengkapan organisasi, antara lain: kantor sekretariat, alat-alat administrasi perkantoran, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk kelancaran tugas-tugas organisasi ataupun partai, hal ini terjadi dikarenakan masih belum tersediannya kantor sekretariat partai PKB di awal pembentukan partai tersebut, sehingga masih menggunakan fasilitas kantor sekretariat NU untuk mengadakan rapat-rapat partai.

3. Pengembangan organisasi dan kelembagaan

NU dan PKB akan terus meningkatkan dan memantapkan mekanisme kerja kepemimpinan organisasi di setiap tingkatan dengan prinsip kekeluargaan. Pengembangan organisasi juga dilakukan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja pembinaan kader partai yang sebagian besar berasal dari NU.

Langkah politis yang dilakukan oleh NU Kota Ternate tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah pengikut yang besar dan kemampuan kiai dalam memimpin masyarakat baik dalam masalah keagamaan maupun sosial sangat berperan dalam setiap langkah PKB di pentas perpolitikan baik tingkat nasional maupun lokal yang dalam hal ini adalah Kota Ternate. Hadirnya figur dai yang didasari dengan ilmu keagamaan dan karisma dapat mempermudah untuk mengajak warga atau jamaah NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB, dengan menggunakan berbagai dalih termasuk dalih agama diharapkan mampu menggiring sebanyak-banyaknya suara jamaah NU maupun masyarakat umum untuk memilih PKB pada Pemilu tahun 2009 lalu. Dengan kata lain agama memainkan peranan penting dalam upaya untuk perolehan suara sebanyak-banyaknya.

C. Lembaga NU Sebagai Kekuatan Utama PKB

Sebagai organisasi yang berbasis massa, peranan NU dalam perolehan suara PKB terlihat dari jumlah jamaah NU (termasuk dari pesantren sebagai basis kekuatannya) yang ada di Kota Ternate. Sebagai organisasi yang memiliki massa yang besar, NU mampu memberikan sumbangan yang besar bagi perolehan suara PKB. Meskipun secara politis, PKB mendapatkan suara secara legitimasi kelahirannya dibidani oleh struktural NU, tetapi tetap terjadi terbelahnya suara NU di kota ternate menjadi dua yaitu ke PKB dan ke partai lama yaitu PPP, mereka pada waktu itu menyebut PKB sebagai "anak emasnya NU". Masyarakat NU saat itu sangat kompak dan solid dalam upaya untuk memenagkan PKB, dengan menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB. Pesantren sebagai jaringan komunikasi politik masih bisa dikendalikan oleh NU, ini terjadi karena adanya ikatan batin yang kuat antara NU dengan ulama di pesantren, mereka dipersatukan oleh ikatan ajaran Islam ala *Ahlusunnah Wal Jama'ah*. NU dapat melakukan komunikasi politik dengan mudah dan lancar sehingga dengan mudah pula dapat memobilisasi para simpatisan dan para pendukungnya untuk memilih atau memberikan suara mereka kepada PKB. Besarnya jumlah pendukung baik dari masyarakat maupun kalangan pesantren serta kuatnya peranan ulama merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan politik PKB di Kota Ternate.

Sebagai organisasi yang berbasis massa, peranan NU dalam perolehan suara PKB terlihat dari jumlah jamaah NU (termasuk dari pesantren sebagai basis kekuatannya) yang ada di Kota Ternate. Sebagai organisasi yang memiliki massa yang besar, NU mampu memberikan sumbangan yang besar bagi perolehan suara PKB. NU menarik massa pengikut yang sebagian besar berasal dari keluarga-keluarga para ulama, santrinya dan masyarakat umum.. Karena sebagian besar para pendukung PKB berasal dari NU dan terdapat keterikatan yang erat antara kedua lembaga ini maka pada saat itu muncul anggapan bahwa membicarakan NU sama dengan membicarakan PKB dengan panutan para ulama mereka berbondong-bondong untuk memberikan aspirasi politiknya kepada PKB pada saat Pemilu, terutama pada Pemilu tahun 2009.

Meskipun secara politis, PKB mendapatkan suara karena legitimasi kelahirannya dibidani oleh struktural NU, tetapi tetap terjadi terbelahnya suara NU di Kota Ternate menjadi dua yaitu ke PKB dan ke partai lama yaitu PPP, mereka pada waktu itu menyebut PKB sebagai "Anak Emasnya NU". Masyarakat NU saat itu sangat kompak dan solid dalam upaya untuk memenangkan PKB, dengan menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB.

KESIMPULAN

Sejak awal, pembentukan PKB, sebetulnya telah menimbulkan bibit konflik terutama dengan makin terseretnya struktural NU dalam kelahiran Partai baru PKB, Hal ini menjadi masalah serius karena akan berdampak pada polarisasi suara pada tingkat *grass root*, terbelah mengelompok pada massa PKB dan PPP. Dan Jika struktural NU tidak berhati-hati dalam bersikap, yaitu menaungi semua warga

Nadliyin yang bernaung pada partai lain selain PKB, dapat diramalkan akan terjadi eskalasi konflik yang mengakibatkan pecahnya konflik secara fisik pada basis massa antar kedua partai PKB dan PPP, yang semua berasal dari rumah internal Nadliyin. Meskipun demikian dapat dipahami keterlibatan NU tersebut berakibat pada perolehan suara yang secara signifikan mampu menempatkan PKB di atas perolehan suara PPP dalam pemilu 2009 secara Nasional, dan khususnya di Kota Ternate mendapatkan sebuah kursi di lembaga legislatif.

Pada tingkat elite politik, seyogianya PBNU melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan kalangan politisi NU mungkin juga politisi lain yang berada di berbagai fraksi untuk menyamakan visi dalam penyelesaian masalah yang sedang di hadapi. PBNU seyogianya memposisikan dirinya di atas partai-partai, sehingga memungkinkan untuk berperan sebagai penengah, tidak ikut terlibat dalam permainan.

Seharusnya Pimpinan NU di semua tingkatan perlu berjuang keras untuk memberikan penyadaran kepada warga NU betapa pentingnya NU tetap melakukan gerakan yang bersifat sosial-keagamaan maupun sosial-politik, sesuai dengan paham keagamaan NU yang dikenal cukup moderat dan toleran.

Tak sepatutnya NU yang menanggung beban politik secara langsung akibat konflik yang timbul, tetapi sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai massa terbesar menyebar ke seluruh pelosok Jawa, termasuk Kota Ternate. Eksistensi organisasi kemasyarakatan NU banyak diperhitungkan oleh parpol-parpol besar, yang berimplikasi terhadap terseretnya NU kedalam ranah politik praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar. 2005, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Jogyakarta Pustaka Pelajar.
- Ali Masykur Musa , 2008.,*Politik NU dan Pragmatisme Parpol*, Kompas ,
- Bungin, Burhan., 2009., *Penelitian Kualitatif.*, Jakarta., Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W., 1994., *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches.*, California., Sage Publication.
- Choirul Anam. 1997, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU Surabaya* : Bisma Satu Printing 1999 serta Greg barton dan Greg Fealy. *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nadlatul Ulama-Negara*: Yogyakarta. LKIS.
- Kacung Marijan, 1992, *Quo vadis Nu setelah kembali ke Khittah 1926*. Jakarta Erlangga,
- Keller, Suzanne, 1995, *Penguasa Dan Kelompok Elit Peranan Penentu Dalam masyarakat Modern*, Penerbit Yayasan Ilmu –ilmu Sosial, Jakarta,
- Kartodiharjo, sartono (ed).1992, *Pesta demokrasi di Pedesaan Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Jawa Tengah Dan DIY*, Penerbit Aditya media, Yokyakarta,
- Laode Ida, 1980, *Anatomi konflik NU, Ellit Islam dan Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar harapan.,
- Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, PT Gramedia, Jakarta, Pustaka utama,
- Miles Mathew dan Michael Huberman., 1992., *Qualitative Data Analysis.*, California., Sage Publications Inc.

- M. Ali Haidar ,1998. *Sejarah NU: Nadlatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama,
- N. Muhadjir, 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Raake Sarasin Yogyakarta
- Nasution, S, 1988, *Metode penelitian naturalistic Kualitatif*, Tarsito Bandung,
- Poloma, Margaret M.1984, *Sosiaologi Kontemporer*, Rajawali Pers dan yayasan Solidaritas gadjah Mada, Jakarta,
- Ramlan surbakti, 1998, *Perbandingan Sistem Politik*, mophiso Graphika, Surabaya,
- Strauss, Anselm and Juliet Corbin., 1990., *Basic of Qualitative Research : Grounded Theory Procedures and Techniques.*, California., Sage Publications.
- Sanapiah faisal, 1989, *Format –Format Penelitian Sosial dasar-dasar dan Aplikasi Aplikasi*, Gramedia Jakarta,
- Slamet Effendy Yusuf, 2009, *NU & Negara*, Tirta Emas Publishing, Bandung.
- Wahid,Salahuddin, 2002, *Menggagas Peran Politik NU*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta,
- Hendropuspito, 1989, *Sosiologi Sistematis*, Kanisius, Jogja.